



LAPORAN PENYELESAIAN KEGIATAN TAHUN 2021

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Jalan Jenderal A. Yani No 17 A Muara Enim 31311

Telp (0734) 421194 - Fax (0734) 421194

Website : www-pn-muaraenim.go.id

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyusun dan menyelesaikan Laporan Penyelesaian Kegiatan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2021.

Laporan Penyelesaian Kegiatan ini dimaksud untuk memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, juga sebagai bahan evaluasi kerja baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan untuk Tahun 2021 dan mempersiapkan diri memasuki tahun anggaran 2022. Selain itu laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan transparansi dari Pengadilan kepada Masyarakat.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan tujuan yang diharapkan, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang kami miliki.

Laporan ini dapat terlaksana berkat usaha dan kerja sama seluruh pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kami berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan Laporan Penyelesaian Kegiatan ini dan disadari terdapat kekurangan yang perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik membangun demi kesempurnaan pelaksanaan tugas untuk masa-masa yang akan datang. Semoga laporan ini punya makna dan arti dalam kegiatan keseharian kita.

Muara Enim, 4 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim




ELVIN ADRIAN, SH., MH
NIP 19790111 200212 1003

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum	
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	3
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	4
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	4
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	5
B. Penyelesaian Perkara	
- Jumlah sisa perkara yang diputus	6
- Jumlah sisa perkara yang diputus tepat waktu	6
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,Kasasi dan PK.....	7
- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi	7
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	7
- Jumlah perkara pidana yang disidang secara elektronik	8
C. Akreditasi penjaminan mutu	
- POSBAKUM	8
BAB III Sumber Daya Manusia	
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan	10
- Mutasi	11
- Promosi	12
- Pensiun	13
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti diklat)	13
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	
A. Pengelolaan Keuangan.....	16
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	17
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	29
- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum ..	29
- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum	31

BAB V Peningkatan pelayanan Publik	
- Akreditasi Penjaminan Mutu	33
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35
- Inovasi Pelayanan Publik	42
 BAB VI Pengawasan	
A. Internal	47
B. Evaluasi	48
 BAB VII Penutup	
A. Kesimpulan	51
B. Rekomendasi	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan untuk masyarakat umum.

Kekuasaan badan peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 guna terselenggaranya negara hukum.

Kekuasaan tersebut oleh UUD 1945 diberikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan-badan peradilan yang ada dibawahnya, diantaranya adalah badan peradilan umum yang pada peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Muara Enim yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu peradilan umum yang berada di bawah

Pengadilan Negeri Muara Enim, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kabupaten Muara Enim

B. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Muara Enim

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim. Visi Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung”

Misi Pengadilan Negeri Muara Enim :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim.

C. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

BAB II

PENGELOLAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

- a. Keadaan perkara di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Perkara Pidana

No	Satuan Kerja	Sisa perkara tahun lalu	Perkara Masuk 2021	Perkara yang diputus	Sisa Perkara	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim						
1.	Pidana	70	748	774	44	Pidana Biasa
		0	33	30	3	Pidana Anak
		0	11	11	0	Pidana cepat
		0	0	0	0	Pidana singkat/ingan/lain
		0	1	1	0	Pidana pra peradilan
		0	2366	2336	0	Pidana lalu lintas

Perkara Perdata

No	Satuan Kerja	Sisa Perkara Tahun lalu	Perkara Masuk 2021	Perkara yang diputus	Sisa Perkara	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim						
1.	Perdata	11	32	31	12	Gugatan
		0	111	98	13	Gugatan sederhana
		1	16	15	2	Permohonan

Laporan Penyelesaian Kegiatan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2021

- b. Keadaan perkara di tingkat Banding pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Perkara Pidana

No	Satuan Kerja	Sisa perkara banding tahun lalu	Perkara banding 2021	Perkara yang diputus	Sisa Perkara banding	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim						
1.	Pidana	1	12	13	0	Pidana Biasa
		0	2	2	0	Pidana Anak

Perkara Perdata

No	Satuan Kerja	Sisa Perkara banding Tahun lalu	Perkara Banding 2021	Perkara yang diputus	Sisa Perkara	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim						
1.	Perdata	4	10	12	2	Gugatan
		0	0	0	0	Gugatan sederhana
		0	0	0	0	Permohonan

- c. Keadaan perkara di tingkat Kasasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Perkara Pidana

No	Satuan Kerja	Sisa perkara kasasi tahun lalu	Perkara Kasasi 2021	Perkara yang diputus	Sisa Perkara kasasi	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim						
1.	Pidana	3	7	1	9	Pidana Biasa
		0	2	0	2	Pidana Anak

Laporan Penyelesaian Kegiatan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2021

Perkara Perdata

No	Satuan Kerja	Sisa Perkara kasasi Tahun lalu	Perkara kasasi 2021	Perkara yang diputus	Sisa Perkara kasasi	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim						
1.	Perdata	5	10	5	10	Gugatan
		0	0	0	0	Gugatan sederhana
		0	0	0	0	Permohonan

d. Keadaan perkara di tingkat Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Perkara Pidana

No	Satuan Kerja	Sisa perkara PK tahun lalu	Perkara PK 2021	Perkara yang diputus	Sisa Perkara PK	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim						
1.	Pidana	0	1	0	1	Pidana Biasa
		0	0	0	0	Pidana Anak

Perkara Perdata

No	Satuan Kerja	Sisa Perkara PK Tahun lalu	Perkara PK 2021	Perkara yang diputus	Sisa Perkara PK	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim						
1.	Perdata	0	1	0	1	Gugatan
		0	0	0	0	Gugatan sederhana
		0	0	0	0	Permohonan

B. PENYELESAIAN PERKARA

a. Jumlah sisa perkara yang diputus

No	Satuan Kerja		Sisa Perkara Tahun lalu	Perkara Masuk 2021	Perkara yang diputus	Sisa Perkara
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM						
1.	Pidana	Pidana Biasa	70	748	774	44
		Pidana Anak	0	33	30	3
		Pidana cepat	0	11	11	0
		Pidana singkat/ringan/lain	0	0	0	0
		Pidana pra peradilan	0	1	1	0
		Pidana Lalu lintas				
2.	Perdata	Gugatan	11	32	31	12
		Gugatan sederhana	0	111	98	13
		permohonan	1	16	15	2

b. Jumlah sisa perkara yang diputus tepat waktu

No	Satuan Kerja		Sisa Perkara Tahun lalu	Perkara Masuk 2021	Perkara yang diputus	Sisa Perkara
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM						
1.	Pidana	Pidana Biasa	70	748	774	44
		Pidana Anak	0	33	30	3
2.	Perdata	Gugatan	11	32	31	12
		Gugatan sederhana	0	111	98	13
		permohonan	1	16	15	2

c. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK

No	Satuan Kerja		Sisa tahun lalu	Perkara Masuk	Perkara Putus	Perkara mengajukan			Perkara tidak ajukan		
						Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM											
1.	Pidana	Pidana Biasa	70	748	774	12	7	1	762	767	773
		Pidana Anak	0	33	30	2	2	0	28	28	30
2.	Perdata	Gugatan	11	32	31	10	10	0	11	11	0
		Gugatan sederhana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		permohonan	0	0	0	0	0	0	0	0	0

d. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di mediasi	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim				
1.	Perdata 2021	32	0	Gugatan
		111	0	Gugatan sederhana
		15	0	Permohonan

e. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi	Ket
1.	Pengadilan Negeri Muara Enim	33	5	

f. Jumlah perkara pidana yang disidang secara elektronik

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Pidana Biasa	Jumlah Perkara Pidana Anak	Ket
1.	Pengadilan Negeri Muara Enim	748	33	

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

• **POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)**

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu dengan menyelenggarakan kegiatan pemberian layanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, salah satunya dengan pembentukan posbakum pengadilan. Posbakum (pos bantuan hukum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan kehakiman dan Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2021 mendapat anggaran dari Mahkamah Agung RI untuk Posbakum dalam DIPA 03 (Program peningkatan manajemen peradilan Mahkamah Agung RI) sebesar Rp 38.400.000,-. Realisasi untuk kegiatan posbakum ini adalah :

No	Satuan kerja	Pagu DIPA	Total realisasi		Sisa	Ket
			Rupiah	Persentase		
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM						
1.	Posbakum	Rp 38.400.000,-	Rp 38.400.000,-	100 %	0	

Posbakum Pengadilan Negeri Muara Enim dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan hukum PERADI Kabupaten Muara Enim dengan MOU Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : W6-U6/80/HK.00/I/2021 tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Muara Enim. Adapun masyarakat yang menggunakan layanan posbakum ini tercatat dalam buku register posbakum, yang di tanda tangani oleh petugas register posbakum dan Panitera Pengadilan Negeri. Masyarakat yang datang menggunakan posbakum untuk layanan konsultasi.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN / PENDIDIKAN

Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Muara Enim sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) orang Hakim dan 24 (Dua Puluh Empat) pegawai.

a. Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan / Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
II/c	1	0	1
III/a	2	4	6
III/b	4	1	5
III/c	6	4	10
III/d	6	3	9
IV/a	2	0	2
IV/b	1	0	1
Jumlah	22	12	34

b. Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sarjana (S-2)	5	1	6
Sarjana (S-1)	14	12	26
Sarjana Muda	2	-	2
SMTA	-	-	-
SMTP	-	-	-
SD/SR	-	-	-
Jumlah	21	13	34

c. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan Teknis / Non teknis / Staf

Jabatan Teknis/Non teknis	Golongan								Jumlah	
	I		II		III		IV			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Hakim	-	-	-	-	4	4	1	1	5	5
Calon Hakim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panitera	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Sekretaris	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Panmud	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-
Kasubbag	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1
PP	-	-	-	-	5	5	-	-	5	5
Jurusita	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Jurusita Pengganti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pranata Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1
CPNS	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1
JUMLAH	-	-	1	-	18	12	2	1	21	13

a. Mutasi

Adapun mutasi selama tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:

➤ Mutasi Masuk

Adalah mutasi masuknya Hakim atau pegawai ke Pengadilan Negeri Muara Enim :

1. IKHA TINA, SH.,M.Hum Hakim dari Pengadilan Negeri Sleman, menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 02 Februari 2021.
2. FINA PASTRI SIREGAR, SH, CPNS Pengadilan Negeri Muara Enim terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 02 Februari 2021.

3. IWAN FAJRI, Amd, CPNS Pengadilan Negeri Muara Enim terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 02 Februari 2021.
4. HENDRI KUSTIAN, SH.,MH, Panitera dari Pengadilan Negeri Kayu Agung menjadi Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 09 Juli 2021.
5. IDHAM PRATAMA, SH dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu menjadi Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Muara Enim terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 02 Juli 2021.
6. SELLY NOVERIYATI, SH Hakim dari Pengadilan Negeri Lahat menjadi Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 04 November 2021.

➤ **Mutasi Keluar**

Adalah mutasi keluarnya hakim atau pegawai dari Pengadilan Negeri Muara Enim :

1. AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim mutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, terhitung melaksanakan tugas mutasi tanggal 27 Januari 2021.
2. DARMAWATI, SH Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim mutasi menjadi Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih, terhitung melaksanakan tugas mutasi tanggal 08 Juli 2021.

3. DEDY SOHAIDI, SH Panitera Muda Perdata mutasi menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, terhitung melaksanakan tugas mutasi tanggal 01 Juli 2021.
4. PROVITA JUSTISIA, SH Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim mutasi menjadi Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, terhitung melaksanakan tugas mutasi tanggal 29 Oktober 2021.

b. Promosi

Pada tahun 2021 tidak ada Promosi di Pengadilan Negeri Muara Enim.

c. Pensiun dan Meninggal

Pada tahun 2021 tidak ada pegawai yang pensiun dan meninggal.

d. Data hakim dan pegawai yang mengikuti diklat

Data hakim yang mengikuti Diklat Teknis dan Non Teknis pada 2021 yaitu :

No.	Nama	Nama Diklat	TMT Diklat	Instansi Penyelenggara
1.	Elvin Adrian, SH.,MH	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup bagi hakim Peradilan umum angkatan XII	25 Januari s/d 5 Maret 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
2.	Haryanto Das'at, SH.,MH	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup bagi hakim Peradilan umum angkatan XII	25 Januari s/d 5 Maret 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
3.	Titis Ayu Wulandari, SH	Pelatihan Online English Effective Writing	22 Februari s/d 2 Maret 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI

4.	Elvin Adrian, SH.,MH	Pelatihan Online Teknik Story Telling	05 April s/d 07 April 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
5.	Haryanto Das'at, SH.,MH	Pelatihan Sertifikasi Mediator gelombang 4 bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia	23 Agustus s/d 22 September 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
6.	Otniel Yuristo Yudha Prawira, SH	Focus Group Discussion (FGD) Penelitian dengan Judul "Pedoman Penyusunan Kebijakan MA"	23 September 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
7.	Provita Justisia, SH	Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Berkelanjutan (CJE) bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	04 s/d 18 Oktober 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
8.	Hartati, SH	Pelatihan Advanced bagi hakim anak lingkungan peradilan umum tahap 2 kelas klasikal/tatap muka	18 November s/d 01 Desember 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI

Data Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Non Teknis pada 2021 yaitu :

No.	Nama	Nama Diklat	TMT Diklat	Instansi Penyelenggara
1.	Syaifullah, SE, MM	Pelatihan Kepemimpinan Administrator angkatan III sd V	4 Januari s/d 9 April 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI

2.	Kms. Muhammad Amin, SH	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan III sd V	4 Januari s/d 19 April 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
3.	Yurika Ariani, ST	Pelatihan Online Basic Infographic Design dengan Adobe Illustrator Kelas 01 s/d 04	01 s/d 05 Februari 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
4.	Ester Meriyanti Sinaga, SE	Pelatihan Online Basic Infographic Design dengan Adobe Illustrator Kelas 01 s/d 04	01 s/d 5 Februari 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
5.	Iwan Fajri, Amd	Pelatihan Online Basic User Experience Design kelas 01 s.d 03	15 s/d 19 Februari 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
6.	Kms. Muhammad Amin, SH	Pelatihan Online English Effective Presentation bagi peserta PKP gel. 1 angkatan XVII s.d XXV	31 Maret s/d 09 April 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
7.	Yurika Ariani, ST	Pelatihan Online Teknik Penyusunan IKU dan RENSTRA Tahun 2021	15 Maret s/d 19 Maret 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
6.	Syaifullah, SE.,MM	Pelatihan Online English Effective Presentation bagi peserta PKA gel. 1 angkatan III s.d V	15 Maret s/d 23 Maret 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
7.	Kms. Muhammad Amin, SH	Pelatihan Online Manajemen Laporan Kinerja golongan II	21 Juni s/d 25 Juni 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI

8.	Iwan Fajri, Amd	Pelatihan Online Membangun Pola Pikir berkelanjutan dan kecepatan pembelajaran (Cultivating Growth Mindset and Learning Agility) bagi CPNS kel A4 s.d A5	10 Agustus s/d 13 Agustus 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
22.	Yurika Ariani, ST	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) angkatan VI s.d VIII	06 September s/d 15 Desember 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
23.	Syaifullah, SE.,MM	Pelatihan teknis online pejabat pembuat komitmen (PPK) pada jasa konstruksi tata cara penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah bidang jasa konstruksi.	04 s/d 16 Oktober 2021	Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional
24.	Bambang Sugeng Riyadi, SH	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Peradilan Umum Seluruh Indonesia Gel. 2	25 Oktober s/d 10 November 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional)

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim tahun anggaran 2021, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

N o	Jenis Belanja	Anggaran	Total Realisasi		Sisa
			Rupiah	Persentase	
1	Belanja pegawai	Rp 3.864.875.000	Rp 3.809.150.516	98.56	Rp 55.724.484
2	Belanja Barang	Rp 1.217.739.000	Rp 1.203.187.756	98.81	Rp 14.551.244
3	Belanja Modal	Rp 65.000.000	Rp 64.774.000	99.65	Rp 226.000
Total		Rp 5.147.614.000	Rp 5.077.112.272	98.63	Rp 70.501.728

2. Pagu dan realisasi Dipa (03) Badan Peradilan Umum

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan non operasional dan operasional persidangan peradilan sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Total Realisasi		Sisa
			Rupiah	Persentase	
1	Belanja Barang	Rp 325.693.000	Rp 325.176.300	99.84	Rp 516.700
Total		Rp 325.693.000	Rp 325.176.300	99.84	Rp 516.700

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana



Gedung kantor Pengadilan Negeri Muara Enim masih terletak di jalan Jendral Ahmad Yani No. 17 A diatas tanah seluas 2.233 m² dengan luas tanah bangunan 1.034 m² dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman dan lain-lain) 679 m² dengan sertifikat Hak pakai No.7/kelurahan Muara Enim yang telah lama dibalik nama menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.06/2009 dan Kepala

Badan Pertanahan No. 24 Tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang persertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah. Untuk gedung kantor pengadilan sampai saat ini masih belum *prototype* sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sarana kendaraan dinas, Pengadilan Negeri Muara Enim, kondisinya:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Pengadilan Negeri Muara Enim					
	1. Kendaraan Roda 4	a. 2008	✓	-	-	-
	a. Kijang Innova E					
	2. Kendaraan Roda 2					
	a. Honda NF.100	a. 2003	✓	-	-	-
	b. Honda NF.100	b. 2003	✓	-	-	-
	c. Honda Supra XNF 125 50	c. 2006	✓	-	-	STNK.AN .PT.PLG
	d. Honda Supra XNF 125 50	d. 2006	✓	-	-	STNK.AN .PT.PLG

Untuk kendaraan dinas roda empat (4), pada tahun 2021 sebanyak satu (1) unit yang digunakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim

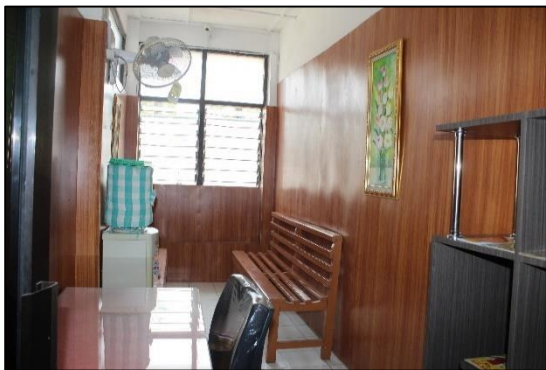
Untuk kendaraan dinas roda dua (2), sebanyak empat (4) unit. Yaitu :

- 1 (satu) unit Honda Supra NF 125 SD Tahun 2005, kondisi baik warna hitam dengan nomor polisi BG 5606 NZ digunakan oleh Kasub Umum dan Keuangan.
- 1 (satu) unit Honda Supra NF 125 SD tahun 2005 kondisi baik warna hitam dengan nomor polisi BG 5610 NZ digunakan oleh Kasub Kepegawaian.

- 1 (satu) honda supra NF 100 tahun 2003 kondisi baik warna hitam dengan nomor polisi BG 6004 DZ digunakan oleh Jurusita Pengganti.
- 1 (satu) unit honda supra NF 100 tahun 2003 kondisi baik warna hitam dengan nomor polisi BG 6005 DZ digunakan oleh Staf Umum dan Keuangan.

Adapun sarana dan prasarana pada Kantor Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain :

GAMBAR-GAMBAR SARANA DAN PRASARANA :



Ruang tunggu ramah anak



Ruang sidang anak

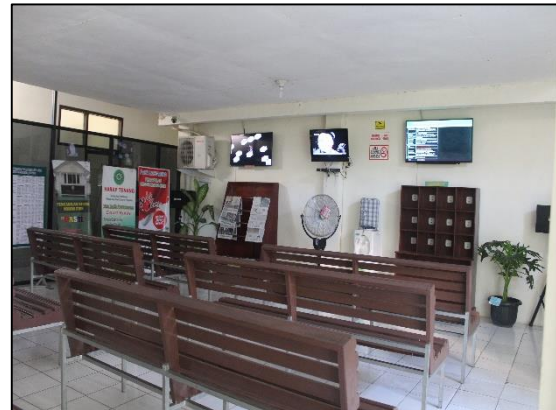
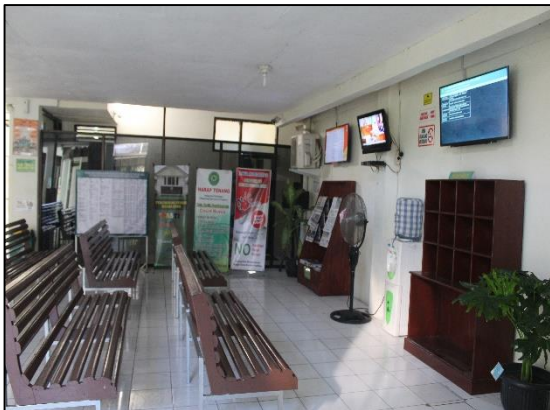


Ruang tunggu : anak korban, orang tua, BAPAS, penasehat hukum





Ruang video Conference pada ruang sidang anak



Ruang tunggu pengunjung dengan memasang TV jadwal sidang dan TV biaya radius perkara perdata



Wilayah smooking area



Musholla



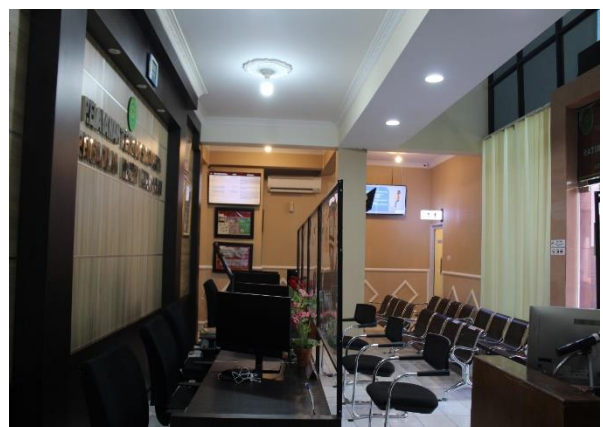
Ruang POSBAKUM



Ruang tunggu Jaksa



Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

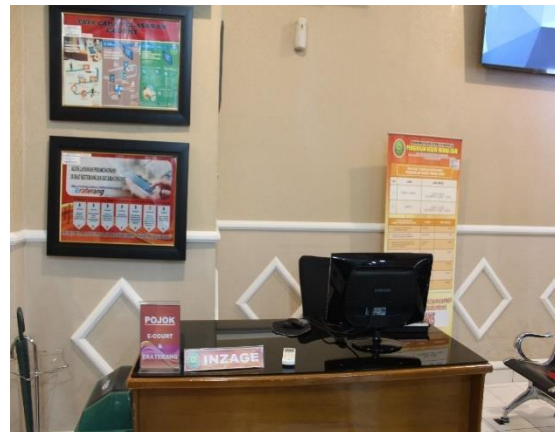




Kursi pengunjung PTSP dilengkapi dengan antrian pengunjung, media informasi (TV informasi) dan toilet khusus pengunjung



Meja Informasi dan Pengaduan



Meja Inzage



Ruang khusus tamu pengunjung



Jalur khusus difabel



Area parkir khusus untuk disabilitas



Kursi roda untuk penyandang disabilitas



Kios K touchscreen untuk Survei IPK dan IKM



Meja untuk pengunjung menulis



Kotak saran manual

Laporan Penyelesaian Kegiatan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2021



Televisi Informasi Profil



Ruang Mediasi



Ruang Sidang Prof. Dr. Kusumah Atmaja



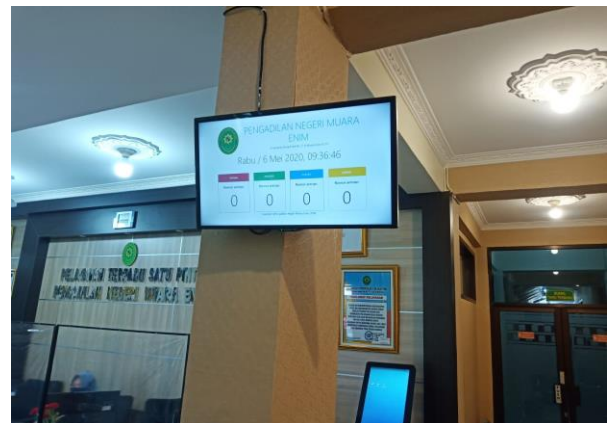
Ruang sidang Cakra



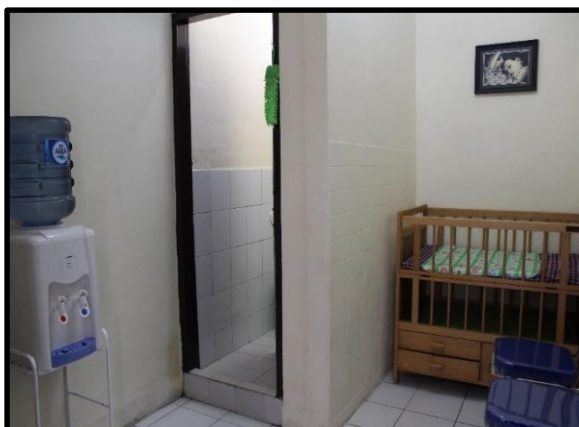
Akses masuk ruangan dengan finger scan / card scan



Ruang Media Center



Antrian pengunjung PTSP



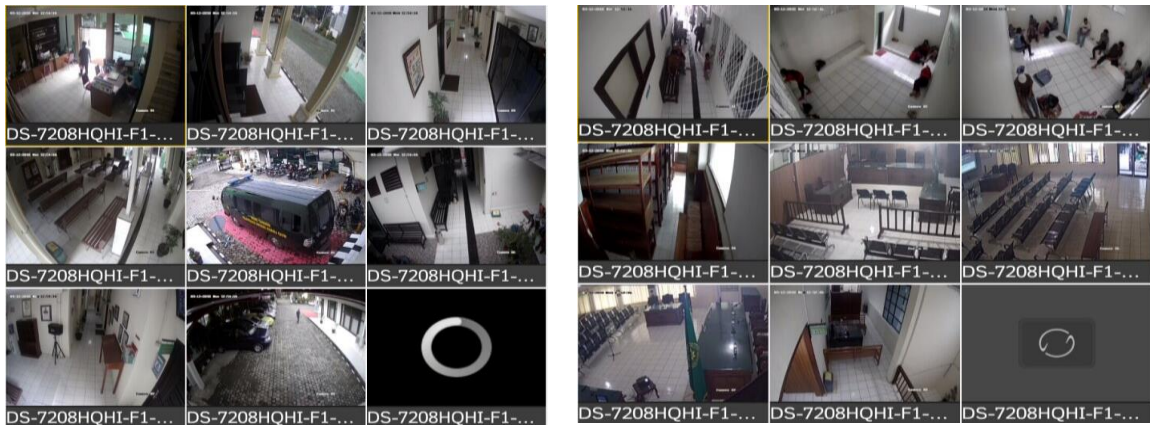
Ruang Laktasi



Toilet untuk Disabilitas



Ruang perpustakaan



CCTV



Mesin genset

Berikut laporan Barang Milik Negara berupa rumah dinas Pengadilan Negeri Muara Enim :

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Pengadilan Negeri Muara Enim					
	1. Rumah Dinas ketua	1	✓	-	-	Sertifikat No. 11
	2. Rumah Dinas Wakil Ketua	1	✓	-	-	Sertifikat No. 12
	3. Rumah Dinas hakim	5	✓	-	-	Sertifikat No. 28
	4. Rumah Dinas Panitera	1	✓	-	-	Sertifikat No. 29
	5. Rumah Dinas Sekretaris	1	✓	-	-	Sertifikat No. 28

Laporan Barang Milik Negara berupa sarana prasarana Pengadilan Negeri Muara Enim :

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Pengadilan Negeri Muara Enim		
	1. Ruang Ketua	1	-
	2. Ruang Wakil Ketua	1	-
	3. Ruang Hakim	2	-
	4. Ruang Panitera	1	-
	5. Ruang Sekretaris	1	-
	6. Ruang Sidang Umum	2	-
	7. Ruang Sidang Ramah Anak	1	-
	8. Ruang tunggu Bapas, BK	1	-
	9. Ruang tunggu ramah anak	1	-
	10. Ruang videoconference anak	1	-
	11. Ruang mediasi	1	-
	12. Ruang Kepaniteraan	3	-
	13. Ruang Kesekretariatan	3	-
	14. Ruang Perpustakaan	1	-
	15. Ruang Bendahara / DYK	1	-
	16. Ruang Musholla	1	-
	17. Ruang Penasehat Hukum	1	-
	18. Ruang Tahanan Dewasa	2	Pria dan Wanita
	19. Ruang Tunggu Jaksa	1	-
	20. Ruang Posbakum	1	-
	21. Ruang Laktasi	1	-
	22. Ruang Arsip	2	-
	23. Ruang PTSP dan informasi	1	-
	24. Ruang Tunggu Pengunjung	1	-
	25. Area Merokok	1	-
	26. Ruang Tunggu KPN. Wakil. Panitera	1	-
	27. WC KPN, WKPN, Hakim, Panitera	1	-
	28. WC pengunjung laki-laki / perempuan	1	-
	29. WC Pegawai	1	-
	30. WC Disabilitas	1	-
	31. WC pengunjung PTSP	1	-
	32. Ruang tunggu tamu terbuka	1	-

	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran		
	33.Komputer / P.C Unit	36	-
	34.Laptop	22	-
	35.Lemari Penyimpan	33	-
	36.Lemari Kayu	20	-
	37.Filling Cabinet Besi	17	4 Kayu
	38.Brankas	2	-
	39.CCTV	1	-
	40.Meja Kerja Kayu	133	-
	41.Kursi Besi Metal	174	-
	42.Kursi Kayu	85	-
	43.Sice	8	-
	44.Bangku Panjang Besi / Metal	30	-
	45.Meja Komputer	18	-
	46.Meja Resepsionis	2	-
	47.Partisi	1	-
	48.AC. Split	32	12 AC Sentral
	49.Sound System	1	-
	50.Unit Power Supply	2	-
	51.Genset	2	-
	52.Rak server	1	-
	53.Server	2	-
	54.Standing tablet	1	-

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

a. Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum

Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan kegiatannya berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Juga tuntutan para pencari keadilan dan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi. Sehingga dimungkinkan peradilan Indonesia memiliki sistem untuk melakukan pemanggilan para pihak melalui

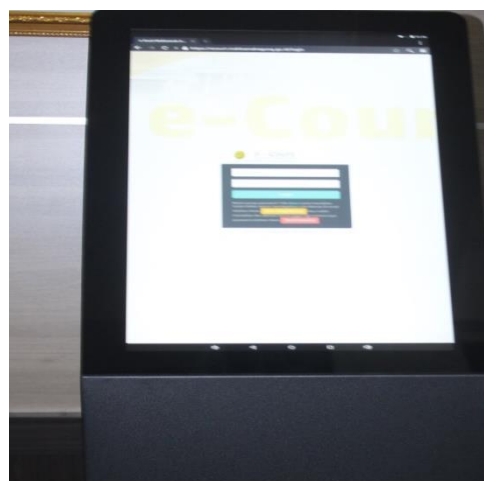
media elektronik yang saat ini di buat sebuah inovasi yaitu aplikasi e-court. Payung hukum pelaksanaan administrasi secara elektronik ini adalah peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Layanan e-court ini dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar.



Aplikasi e-court

Adapun untuk melaksanakan perintah Ketua Mahkamah Agung RI dalam implementasi e-court tersebut adalah :

1. Pemasangan sapras pendukung e-court yaitu :
 - Kios Touchscreen untuk aplikasi e-court



Kios-K Touchscreen



Pojok e-court dan eraterang

4. Jumlah perkara yang mendaftar dengan menggunakan aplikasi e-court pada tahun 2021 :

NO	PERKARA	Mendaftar dengan e-court	E-litigasi	Banding e-court
1.	Gugatan	32	18	0
2.	Gugatan Sederhana	111	0	0
3.	Permohonan	16	0	0

Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Muara Enim menerima anugerah sebagai Pengadilan Negeri terbaik peringkat 4 (empat) dalam Kategori Pelaksanaan Peradilan Elektronik Pengadilan Kelas II Peradilan Umum, yang diumumkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, Dr. H. Hasbi, M.H. pada Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI Ke-76, di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2021.

b. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum

Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Peradilan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI, salah satunya adalah dengan meningkatkan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi di Pengadilan sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan adapun pengelolaan rutinnya merupakan pelaksanaan dari SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144 tahun 2007 tersebut. Sebagai bagian dari core bisnis Peradilan Umum yaitu penyelesaian perkara, maka Mahkamah Agung RI meluncurkan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang tujuannya memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara. Selain itu, aplikasi SIPP ini difungsikan pimpinan Pengadilan untuk memonitor kinerja Hakim dan aparatur Pengadilan, tertib administrasi sebagai media kerja yang efektif bagi pengawasan internal.

Adapun untuk melaksanakan perintah Ketua Mahkamah Agung RI dalam implementasi SIPP tersebut adalah :

- Peningkatan bandwidth internet dengan menggunakan internet dedicated yaitu bandwidth 60 Mbps.
- Update aplikasi SIPP. Sampai saat ini aplikasi SIPP yang sudah di update versi 4.1.1
- Untuk mewujudkan transparansi penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Muara Enim telah melakukan publikasi terhadap perkara, baik pidana maupun perdata. Untuk publikasi perkara secara keseluruhan dapat dilihat pada aplikasi SIPP versi 4.1.1 yang beralamat di <http://sipp.pn-muaraenim.go.id>

Laporan Penyelesaian Kegiatan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2021

Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Muara Enim dalam Monitoring Implementasi SIPP rasio perkara telah mencapai 90,98 %. Dengan jumlah perkara tahun lalu sebanyak 97 perkara, perkara yang masuk sebanyak 956 perkara dan yang telah diminutasi sebanyak 958 perkara. Dengan pencapaian ini diharapkan pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Muara Enim dapat mempertahankan dan meningkatkannya lagi.



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (*Court of Excellence*). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Salah satu kebijakan pembaruan Mahkamah Agung adalah dengan melaksanakan penilaian terhadap seluruh peradilan di bawahnya dengan akreditasi penjaminan mutu.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan nomor. 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008, diperkaya dengan penerapan *International Framework for Court Excellent*, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima (*Indonesia Court Performance Excellent – ICPE*).



Di tahun 2021 ini Indonesia mengalami wabah COVID-19 yang berimbas ke seluruh Indonesia, dan begitu juga di wilayah Muara Enim. Tentu saja hal ini mempengaruhi kegiatan *core bisnis* di Pengadilan Negeri Muara Enim. Persidangan tidak dilaksanakan secara tatap muka, namun secara *online*. Untuk mempertahankan nilai akreditasi tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim senantiasa melakukan perbaikan baik dalam adminintrasi teknis maupun administrasi non teknis. Adapun hal-hal yang dilakukan untuk mempertahankan akreditasi ini antara lain :

- Meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP) dengan penambahan sarana prasarana seperti : antrian pengunjung PTSP, toilet pengunjung PTSP, televisi informasi (jangka waktu pelayanan, informasi penggunaan aplikasi), ruang tamu khusus pengunjung.
- Melaksanakan protokol kesehatan baik kepada Hakim, ASN, Honorer maupun pengunjung yang datang ke Pengadilan Negeri Muara Enim
- Peningkatan bandwidth internet dengan mengguakan internet dedicated untuk menunjang persidangan yang dilaksanakan secara online
- Survey Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) secara elektronik dan manual

- Pelaksanaan Audit Internal secara silang di masing-masing bagian dilanjutkan dengan Rapat Tinjauan Manajemen
- Membuat beberapa inovasi seperti : Aplikasi Antrian Pengunjung PTSP(E-Sanjung), Survey Pelayanan Petugas PTSP PN Muara Enim, Buku Tamu PTSP PN Muara Enim, Buku Tamu Umum PN Muara Enim, Aplikasi e-kepegawaian, Aplikasi LKE ZI mandiri (SIDOI), Whatsapp Amin (WA-Amin), Aplikasi Antrian Persidangan Elektronik dan whatsapp informasi jadwal persidangan (E-SINDANG), Aplikasi Elektronik Sistem Informasi Izin Geledah, Izin Sita dan Perpanjangan Penahanan Criminal Justice System (E-SERASAN CJS).
- Meningkatkan kebersihan dan kedisiplinan.
- Rapat tim dokumen kontrol untuk melengkapi ceklist TAPM



Pelayanan persidangan secara online

Pada tanggal 19-20 November 2020, dilaksanakan asesment surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Palembang. Tim Asessor di ketuai oleh Robert Siahaan, SH, MH (Hakim Tinggi), H. Amron Sodik, SH (Hakim Tinggi), Kemal Tampubolon, SH, MH (Hakim Tinggi) dan A. Mahbub Ulhaq, SE (Analisis Perkara Peradilan). Tujuan kegiatan ini adalah melakukan asesment surveillance akreditasi di

Pengadilan Negeri Muara Enim. Open meeting dilaksanakan pada tanggal 19 November 2020 dibuka langsung oleh Ketua tim asessor dan ditutup close meeting pada tanggal 20 November 2020. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 1045/DJU/SK/OT.01.3/3/2021 tanggal 10 Maret 2021, tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Klas IB dan Kelas II Tahun 2020. Pada nomor 87 petikan tersebut, tertera nama Pengadilan Negeri Muara Enim dengan nilai akreditasi sebelumnya adalah 709 dan sekarang adalah 723 dengan predikat A (Excellent).

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Tujuan dari PTSP ini adalah mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Pengadilan Negeri Muara Enim telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang terdiri dari 4 (empat) layanan : layanan umum dan keuangan, pidana, perdata, dan hukum. Selain itu pada PTSP juga terdapat layanan meja informasi dan pengaduan, serta layanan pojok e-court. PTSP pada meja umum dan keuangan bertugas menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri. PTSP pada meja kepaniteraan perdata bertugas menerima pendaftaran perkara baik permohonan, gugatan maupun gugatan sederhana tingkat pertama, banding atau kasasi dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan perdata. PTSP pada meja kepaniteraan pidana bertugas menerima pelimpahan perkara pidana,

pendaftaran perkara pidana, permohonan izin/persetujuan penggeledahan/penyitaan/pemusnahan barang bukti/perpanjangan penahanan/pembantaran dan menyerahkan permohonan yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan pidana. PTSP pada meja kepaniteraan hukum bertugas menerima permohonan pendaftaran pendirian CV/waarmaking surat-surat, pendaftaran surat kuasa/legalisasi surat, permohonan keterangan data perkara, permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara, layanan pengaduan SIWAS MARI dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan hukum.

PTSP Pengadilan Negeri Muara Enim dilengkapi dengan sarana prasarana sebagai berikut :

1. Meja Informasi dan Pengaduan
2. Meja layanan PTSP (Umum, Pidana, Perdata, Hukum)
3. Meja Inzage
4. Kursi pengguna layanan PTSP
5. Mesin antrian pengunjung
6. Kios-K touchscreen untuk aplikasi e-court dan eraterang
7. Air mineral untuk pengunjung
8. Brosur-brosur produk layanan PTSP
9. Kotak saran dan pengaduan
10. Banner dan pamflet informasi Pengadilan
11. Meja untuk menulis bagi pengguna layanan PTSP
12. Mesin EDC
13. Kamera pengawas (CCTV)
14. PC untuk Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Korupsi secara elektronik
15. PC dan printer scanner pada masing-masing meja pelayanan.

16. Jalur khusus bagi penyandang disabilitas

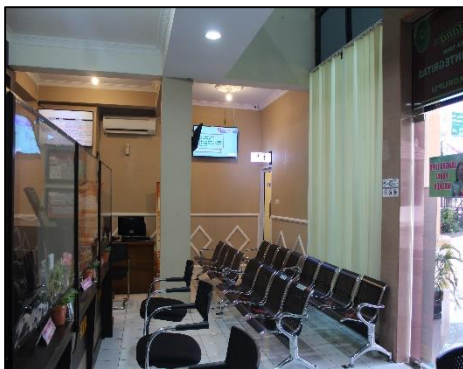
17. Kursi roda bagi penyandang disabilitas



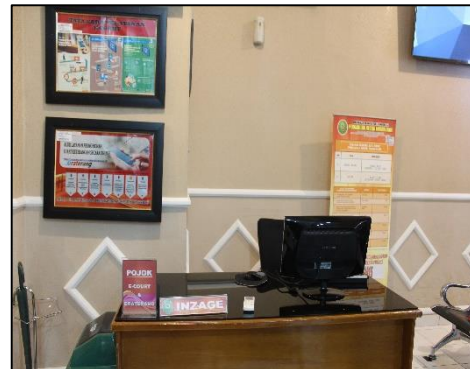
Meja PTSP



Meja Informasi dan Pengaduan
dengan antrian pengunjung



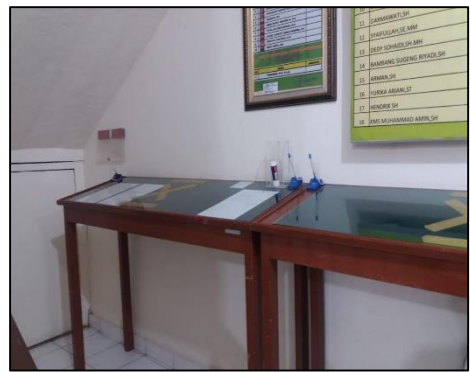
Kursi pengunjung



Meja Inzage dan Pojok e-court



Kursi roda untuk difabel



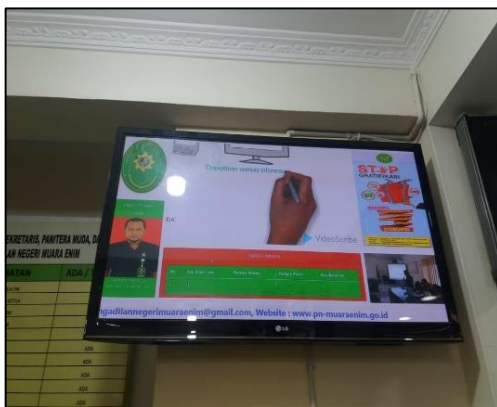
Meja tulis pengguna PTSP



Kotak Saran



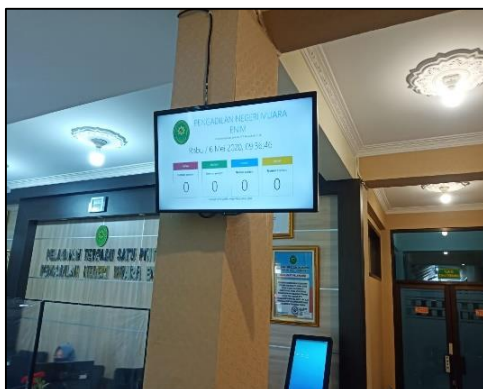
Survey IKM dan IPK secara elektronik



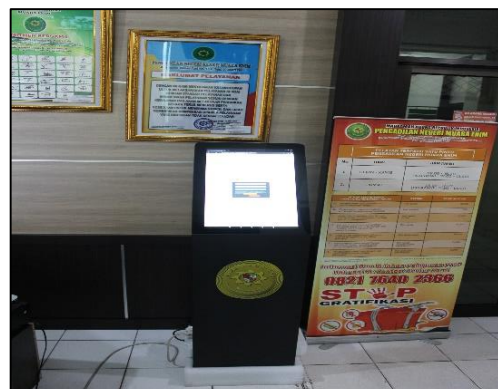
TV Profil Pengadilan



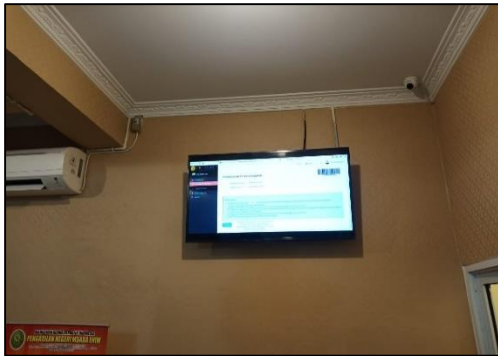
Brosur dan mesin EDC



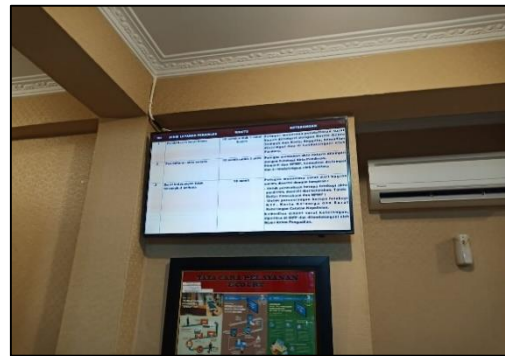
Antrian Pengunjung



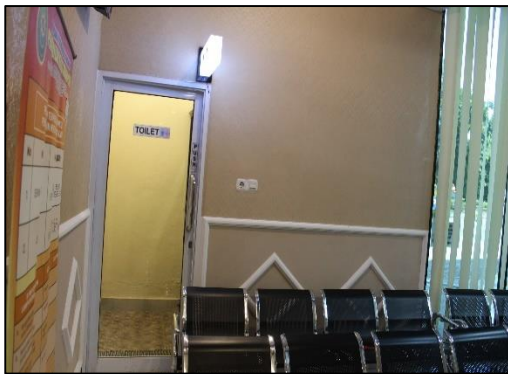
Kios-K Touchscreen e-court dan eraterang



TV informasi produk PTSP



TV informasi jangka waktu pelayanan



Toilet PTSP



Ruang Tamu Terbuka



Jalur khusus difabel





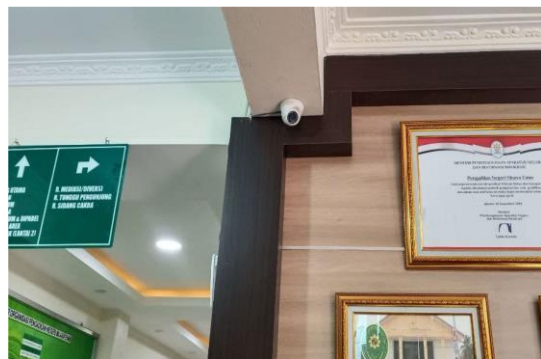
Antrian Prioritas



Tongkat Kaki Tiga



Tempat Duduk Prioritas



CCTV pada PTSP

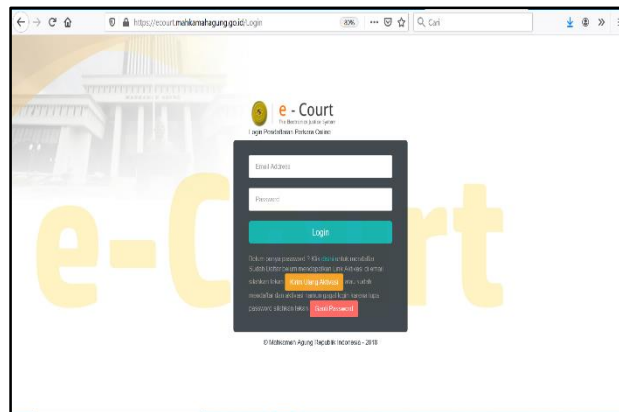
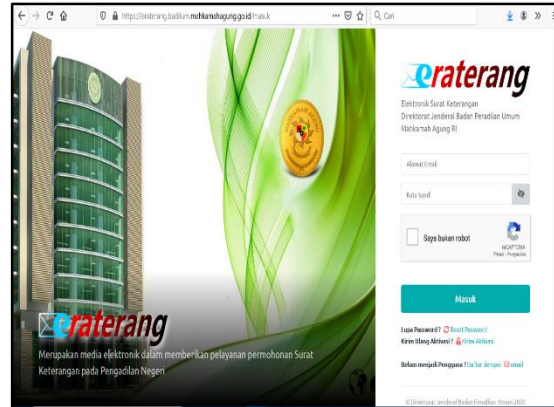
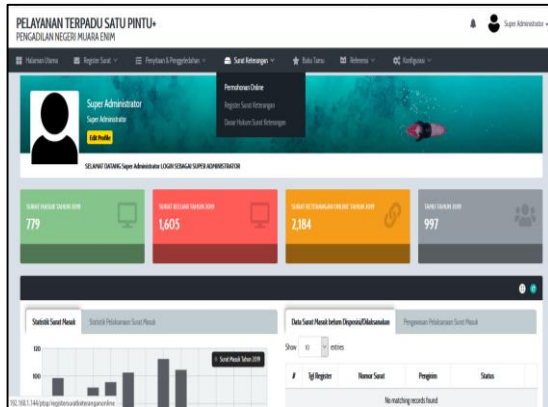


Protokol kesehatan : memakai masker. mencuci tangan, mengukur suhu tubuh



Pelayanan PTSP di era pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020, tidak menyurutkan langkah Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Meja Informasi dan Meja Pelayanan PTSP tetap dibuka dan melayani setiap masyarakat atau pengguna peradilan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Penggunaan teknologi informasi juga lebih di tekankan di era pandemi ini. Seperti penggunaan aplikasi PTSP Plus untuk surat masuk dan keluar, aplikasi era terang untuk pembuatan surat keterangan tidak tersangkut perkara, dan penggunaan aplikasi *e-court* untuk pendaftaran perkara perdata.



Aplikasi e-court

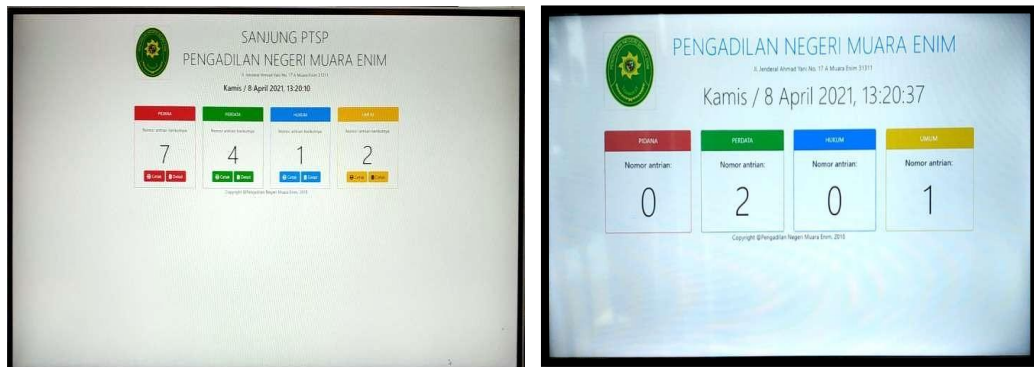
Adapun surat masuk di bagian umum dan keuangan pada aplikasi PTSP plus selama tahun 2021 adalah sebanyak 1264 surat dan surat keluar sebanyak 2268 surat. Khusus di PTSP kepaniteraan Hukum untuk mempermudah masyarakat yang ingin membuat surat keterangan tidak tersangkut perkara, masyarakat bisa menggunakan aplikasi eraterang yang dapat di unduh secara *online* melalui link : <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id> dan permohonan online tersebut akan di proses melalui layanan aplikasi PTSP plus. Pada tahun 2021 surat keterangan tidak tersangkut perkara melalui eraterang yang di dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim sebanyak 1734 surat keterangan.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Tuntutan para pencari keadilan dalam kemudahan berusaha dan perkembangan zaman, mengharuskan pelayanan di Pengadilan menjadi lebih sederhana, efektif dan efisien dan sangat dimungkinkan untuk berbasis elektronik. Dalam menjalankan tupoksinya Pengadilan Negeri Muara Enim berusaha memberikan kepuasan dan layanan terbaik, yaitu dengan membuat beberapa inovasi untuk memberikan kemudahan dan juga informasi kepada para pengguna peradilan.

1. Aplikasi Antrian Pengunjung

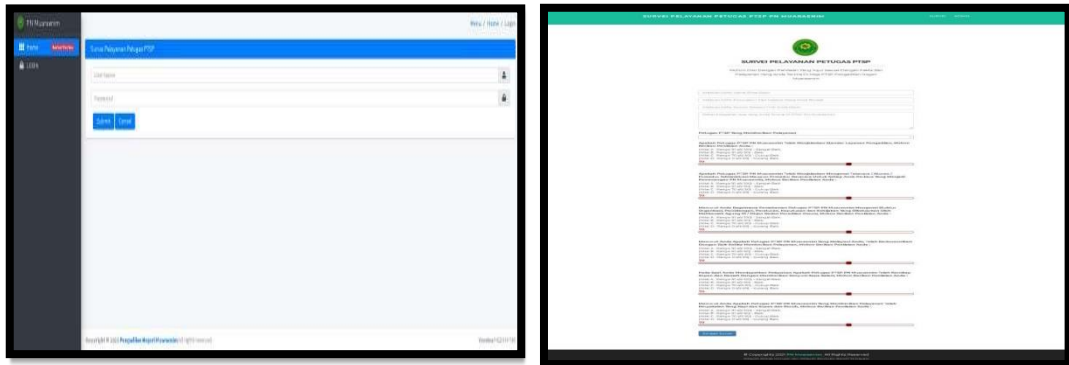
Tujuan dari aplikasi ini dibuat adalah untuk memudahkan antrian para pengguna peradilan di meja PTSP. Antrian ini berbasis elektronik dan layanan PTSP menjadi lebih tertib.



Aplikasi Sanjung (Sistem Antrian Pengunjung)

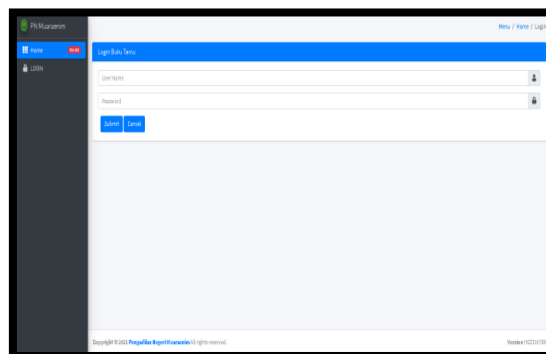
2. Survey Pelayanan Petugas PTSP PN Muara Enim

Survei Pelayanan Petugas PTSP PN Muara Enim merupakan aplikasi survei terkait pemberian pelayanan dari petugas Meja PTSP pada Pengadilan Negeri Muara Enim dalam bentuk kuesioner berbasis elektronik. Data input dari pengunjung akan terekam dan menjadi output berupa Nilai rata-rata petugas PTSP.



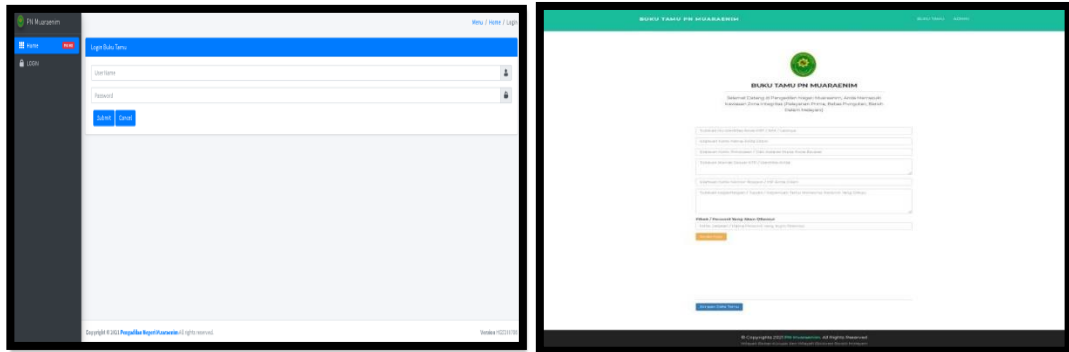
3. Buku Tamu PTSP PN Muara Enim

Buku Tamu PTSP PN Muara Enim adalah aplikasi berbasis elektronik yang merekam data atau informasi terkait tamu /pengunjung Pengadilan Negeri Muara Enim yang memerlukan pelayanan pada meja PTSP. Aplikasi ini dilengkapi dengan Fitur Perekam Wajah dan Notifikasi via telegram bagi Petugas meja PTSP.



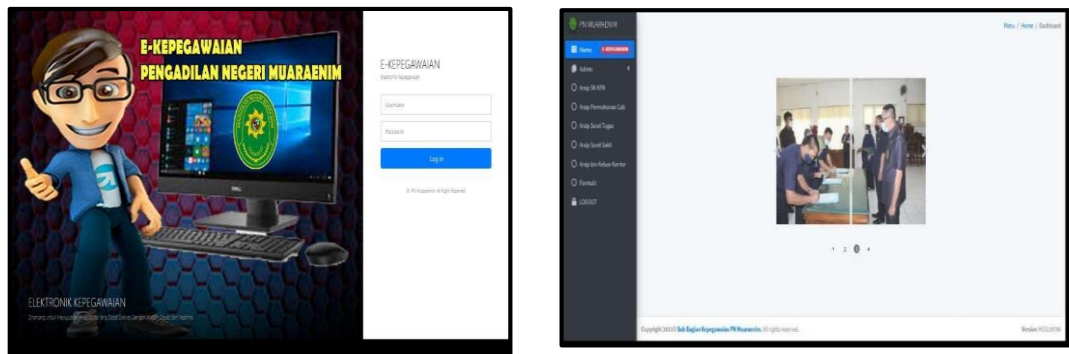
4. Buku Tamu Umum PN Muara Enim

Buku Tamu Umum PN Muara Enim adalah aplikasi berbasis elektronik yang merekam data atau informasi terkait tamu /pengunjung Pengadilan Negeri Muara Enim diluar pelayanan yang terdapat pada meja layanan PTSP. Aplikasi ini dilengkapi dengan Fitur Perekam Wajah dan Notifikasi via telegram bagi Pegawai.



5. Aplikasi E-Kepegawaian

Aplikasi E-Kepegawaian merupakan aplikasi berbasis elektronik yang dirancang untuk mewujudkan sistem kearsipan data. Administrator dalam hal ini bidang Kepegawaian melakukan pengarsipan terkait data secara online dalam bentuk format yang diinginkan guna pencarian yang mudah dan cepat terkait arsip kepegawaian.



6. Aplikasi LKE ZI mandiri

Aplikasi LKE-ZI Mandiri adalah Aplikasi berbasis elektronik dalam rangka mempermudah pengarsipan data-data yang terkait dengan pembangunan Zona Integritas sehingga guna pengaksesan yang lebih cepat dan mudah.



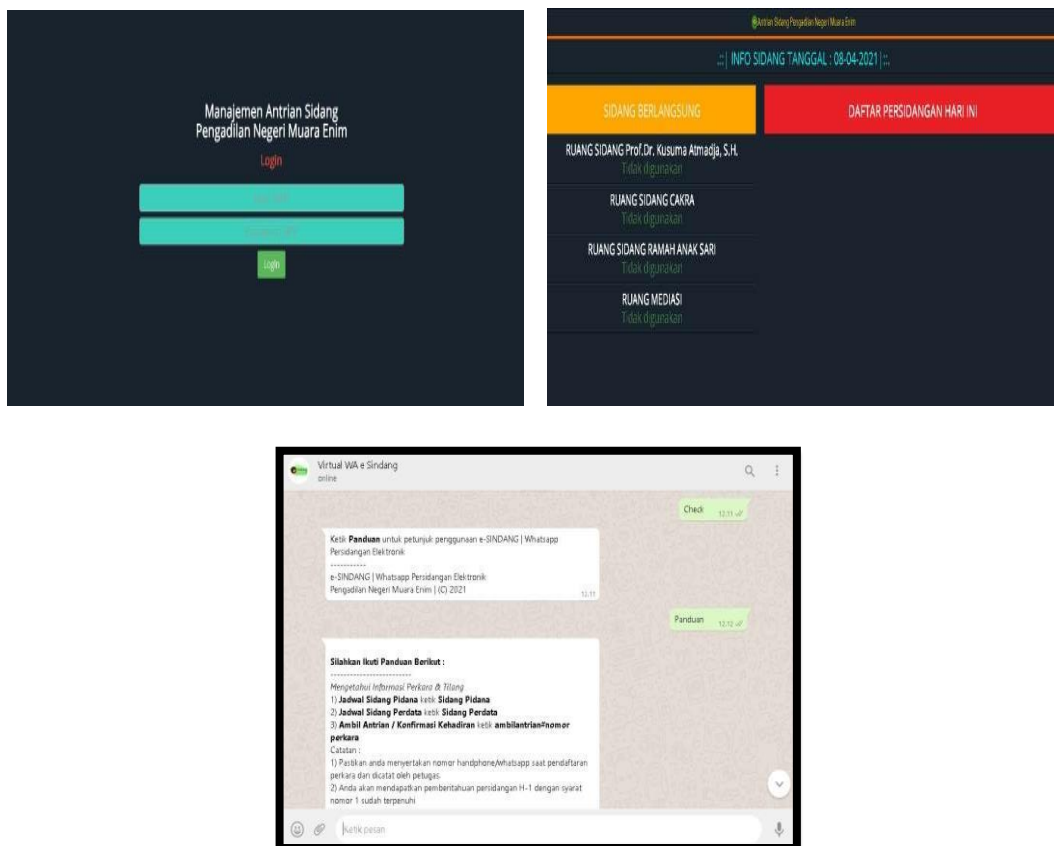
7. Whatsapp Amin (WA- Amin)

WA- AMIN merupakan Virtual Whatsapp informasi pelayanan PTSP pada Pengadilan Negeri Muara Enim. Pengunjung dapat mengakses WA-AMIN via Aplikasi Whatsapp dengan Scan Barcode atau menambahkan Kontak WA-AMIN. Pengunjung juga dapat mengakses aplikasi WA AMIN pada Website Pengadilan Negeri Muara Enim.



8. Aplikasi antrian persidangan elektronik dan whatsapp informasi jadwal persidangan (e sindang)

Aplikasi ini merupakan aplikasi Pelayanan Informasi terkait jadwal sidang yang dilengkapi dengan virtual Whatsapp bagi pengunjung dan konfirmasi kesiapan Sidang bagi Pihak- Pihak terkait (JPU, Penasihat Hukum,dll).

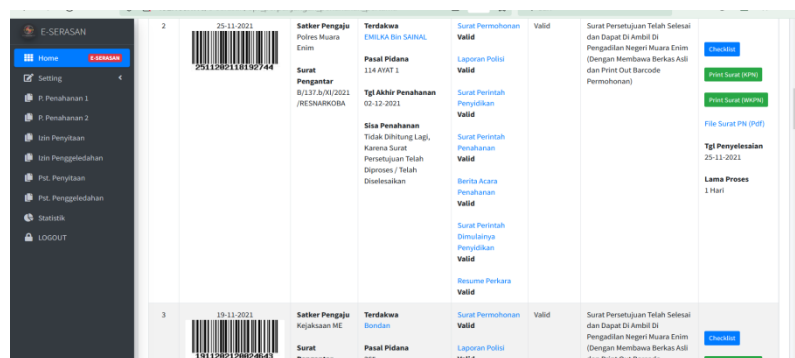
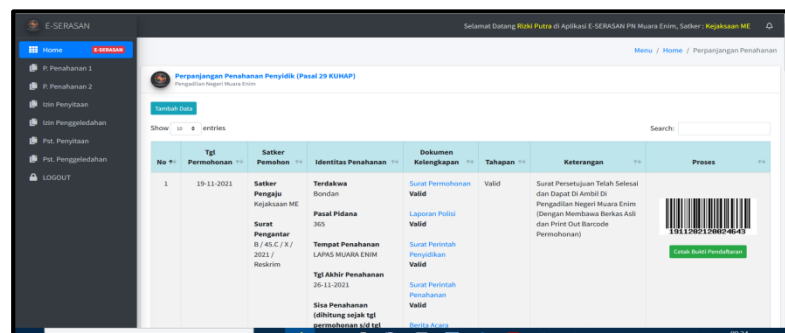
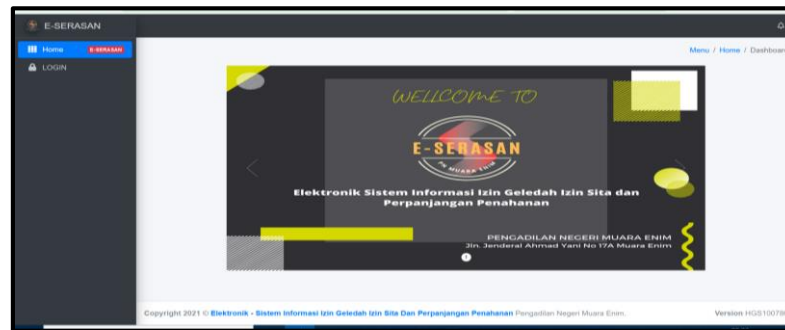


9. Aplikasi E-SERASAN (Elektronik Sistem Informasi Izin Geledah Izin Sita dan Perpanjangan Penahanan)

Aplikasi E-SERASAN adalah aplikasi berbasis elektronik yang digunakan oleh para penyidik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mengajukan permohonan penetapan izin Geledah, Izin Sita dan

Laporan Penyelesaian Kegiatan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2021

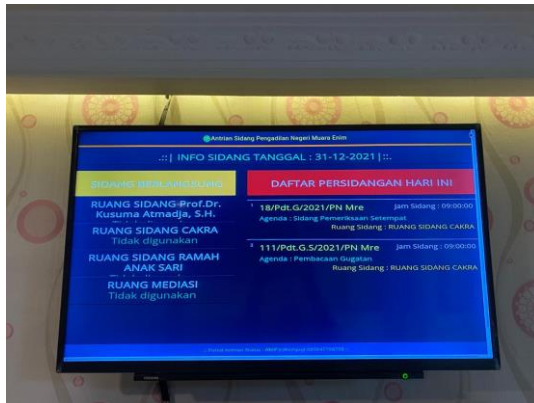
perpanjangan penahanan. Dan digunakan oleh PTSP Kepaniteraan Pidana untuk menerima dan memproses permohonan penetapan yang diajukan para penyidik



10. Televisi Informasi

Untuk memberikan informasi kepada para pengunjung yang datang ke Pengadilan Negeri Muara Enim, maka dibuatlah suatu inovasi yaitu

televisi informasi berupa informasi jadwal sidang, biaya panjar perkara, profil Pengadilan Negeri Muara Enim, SOP Pelayanan PTSP.

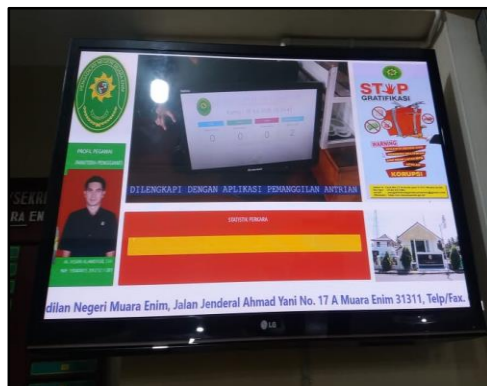


TV informasi jadwal sidang

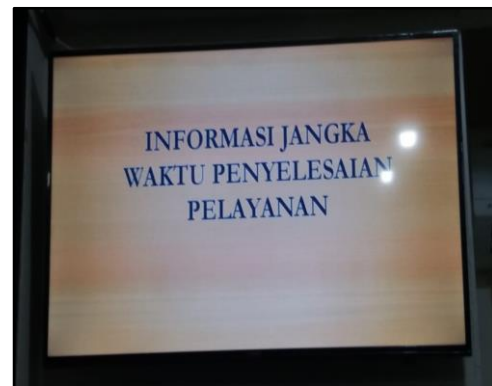
A television screen showing a table of court fees. The table has three columns: "PENGUKUT UTARA", "Korang Tanding", and "Rp". The table lists 13 items, each with a fee of Rp 300.000,00.

PENGUKUT UTARA	Korang Tanding	Rp
1	Korang Tanding	Rp 300.000,00
2	Kota Baru	Rp 300.000,00
3	Luhuk Tampul	Rp 300.000,00
4	Muara Ikan	Rp 300.000,00
5	Prabumelang	Rp 300.000,00
6	Sukarani	Rp 300.000,00
7	Tambak	Rp 300.000,00
8	Tanding Marga	Rp 300.000,00
9	Tanjung Baru	Rp 300.000,00
10	Tempirai	Rp 300.000,00
11	Tempirai Selatan	Rp 300.000,00
12	Tempirai Timur	Rp 300.000,00
13	Tempirai Utara	Rp 300.000,00

TV informasi radius biaya perkara



TV informasi Profil Pengadilan



TV Informasi jangka waktu Pelayanan PTSP

11. Akses terbatas pada ruangan

Untuk menjaga independensi dan integritas hakim dan ASN pada Pengadilan Negeri Muara Enim, maka dibuat sistem penjagaan untuk melewati pintu masuk ruangan Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Hakim, bagian Kepaniteraan menggunakan mesin akses yang dilengkapi dengan kartu akses. Dengan adanya akses penjagaan ini,

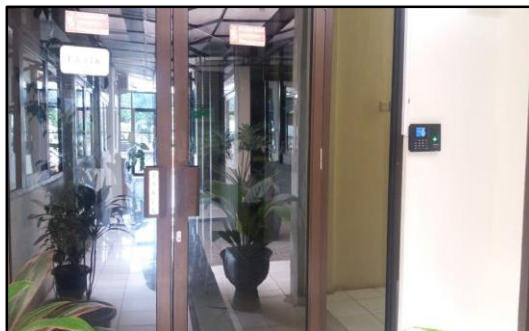
dapat membatasi masyarakat atau para pihak yang berperkara untuk bertemu langsung dengan hakim dan ASN Pengadilan Negeri Muara Enim.



Akses ruang KPN, WKPN, Panitera



Akses ruang Hakim dan Sekretaris



Akses ruangan kepaniteraan



Penggunaan kartu akses

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan Internal adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Pimpinan Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk menjaga agar para pejabat peradilan baik kepada pejabat kepaniteraan maupun kesekretariatan dan para Hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak mengabaikan keluruhan martabat atau tugas jabatannya dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar kode etik profesinya.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud agar dapat memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi pengadilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan, maal administrasi dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan serta menilai kinerja.

Adapun fungsi pengawasan meliputi :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya

- c. Menjamin terwujudnya pelayanan public yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi ; kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah

Pengawasan internal di dalam lingkungan pengadilan terdiri dari dua (2) pengawasan yaitu pengawasan melekat, dan pengawasan rutin.

- **Pengawasan melekat**

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan melekat ini dilakukan dengan melakukan rapat dan membuat laporan bulanan setiap bagian di kepaniteraan yaitu Kepaniteraan pidana, hukum dan perdata dan kesekretariatan yaitu subbagian umum dan keuangan, kepegawaian dan ortala, dan perencanaan dan teknologi informasi dan pelaporan. Panitera juga melakukan pengawasan melekat dengan melakukan rapat bersama seluruh personil kepaniteraan terkait percepatan penyelesaian perkara, adminitrasi kepaniteraan dan permasalahan di bagian kepaniteraan. Sekretaris juga melakukan pengawasan melekat dengan melakukan rapat bersama seluruh personil kesekretariatan terkait pelaksanaan anggaran keuangan, pengelolaan barang milik Negara, absensi, pelaporan dan permasalahan di bagian kesekretariatan.

Pengawasan melekat juga mengatur masalah kedisiplinan baik bagi para hakim maupun pegawai dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya. Dan dipertegas lagi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2019 tentang penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Peraturan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2019 tentang pengawasan dan pembinaan atasan

langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di di bawahnya. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun 2019 tentang pedoman penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Pengawasan melekat juga dilaksanakan kepada para honorer di pengadilan Negeri Muara Enim dengan menilai kinerja honorer setiap bulannya oleh tim penilai yang di tunjuk Ketua pengadilan Negeri Muara Enim berdasarkan Surat keputusan dan dituangkan dalam bentuk lembar evaluasi setiap bulannya. Dan di akhir tahun kinerja para honorer di evaluasi apakah layak untuk di perpanjang atau tidak.

- **Pengawasan rutin**

Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Muara Enim secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan rutin ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

- a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup :
 - administrasi persidangan
 - administrasi perkara
- b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup :
 - administrasi kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan dan teknologi informasi
- c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik.

Dalam melaksanakan pengawasan rutin ini, ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan SK Nomor : W6-U6/76/KP.04.5/I/2019 tentang penunjukan Hakim pengawas bidang dimana ditunjuk hakim yang bertugas sebagai pengawas setiap bidang kepaniteraan dan kesekretariatan. Adapun laporan setiap hakim pengawas bidang tersebut diserahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai koordinator pengawasan.

Disamping itu pengawasan rutin yang dilakukan bersifat membimbing dan membina diwujudkan dengan diadakannya pertemuan berkala oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan segenap jajarannya setiap bulan, sehingga semua kendala-kendala yang ada dapat segera diatasi dan diminimalisir.

B. Evaluasi

Hasil pengawasan internal, baik pengawasan melekat maupun pengawasan rutin harus dituangkan dalam bentuk laporan tertulis disertai dengan bukti dokumentasi dan absensi jika pengawasan dalam bentuk rapat.

Hal hal yang perlu menjadi bahan evaluasi adalah temuan-temuan di lapangan berupa permasalahan setiap bidang, penyebab terjadinya permasalahan tersebut dan rekomendasi perbaikan untuk penyempurnaan atas kekurangan yang ditemui.

Salah satu kegiatan evaluasi pengawasan internal kantor Pengadilan Negeri Muara Enim adalah dengan mengadakan audit internal yang dilakukan oleh tim audit internal pada setiap bidang. Kemudian dilakukan rapat tinjauan manajemen untuk mengevaluasi hasil dari audit internal.

Dengan adanya evaluasi atas hasil pengawasan internal, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan aparat pengadilan. Dilakukannya pembetulan, penyempurnaan, perbaikan dalam

pengelolaan administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan. Sehingga didapat kepuasan atas kinerja pelaksanaan tugas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan demi terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan tahunan tahun 2021 ini memuat uraian lengkap mengenai berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang di emban oleh Pengadilan Negeri Muara Enim baik program kerja, kebijakan strategis, pembinaan sumber daya manusia dan pengelolaan penyelesaian perkara, sarana prasarana, pengelolaan keuangan.

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam wilayah hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Muara Enim telah berjalan baik. Penyempurnaan terhadap kualitas pengelolaan administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan akan tetap dilakukan untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Muara Enim yaitu *“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim Yang Agung”*

B. Rekomendasi

1. Sumber Daya Manusia teknis dan non teknis pada Pengadilan Negeri Muara Enim kiranya dapat ditambah mengingat jumlah perkara yang setiap tahun meningkat dan terdapatnya beberapa pegawai yang merangkap tugas disamping tugas utamanya.

2. Perlunya penambahan anggaran belanja modal untuk sarana dan prasarana serta pembangunan gedung baru Pengadilan Negeri Muara Enim sesuai dengan prototype.
3. Mahkamah Agung dapat mengadakan bimbingan teknis untuk Bagian Kesekretariatan, seperti bidang Umum dan Keuangan, bidang Kepegawaian, Kearsipan maupun Perpustakaan, serta bimbingan untuk pemanfaatan dan pengelolaan Teknologi Informasi. Bimbingan teknis di bagian Kepaniteraan, seperti pengelolaan arsip perkara, bimtek e-court, bimtek SIPP, bimtek pembuatan Berita Acara Perkara, pedoman Layanan hukum dan penanganan pengaduan, serta bimtek Lainnya yang berhubungan dengan percepatan penyelesaian perkara.

LAMPIRAN

PENGHARGAAN YANG DI DAPAT

1. Pengadilan Negeri kelas II dengan Terbaik Keempat se Indonesia dalam Kategori Pelaksanaan Peradilan Elektronik Pengadilan Kelas II Peradilan Umum

Pengadilan Negeri Muara Enim menerima anugerah sebagai Pengadilan Negeri terbaik peringkat 4 (empat) dalam Kategori Pelaksanaan Peradilan Elektronik Pengadilan Kelas II Peradilan Umum, yang diumumkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, Dr. H. Hasbi, M.H. pada HUT Mahkamah Agung RI Ke-76, di Jakarta, Kamis, 19 Agustus 2021



2. Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai salah satu penerima penghargaan untuk Satuan Kerja Dengan Kinerja Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Peringkat 2 Tahun Anggaran 2021.

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama dan peran aktif satuan kerja selama pelaksanaan anggaran tahun 2021, atas kinerja tersebut Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Selatan memilih satuan kerja Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai salah satu penerima penghargaan untuk Satuan Kerja Dengan Kinerja Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Peringkat 2 Tahun Anggaran 2021.

